

WACANA POLITIK IDENTITAS JAMAAH SYATARIAH PADA PEMILU 2019

Rinaldi¹⁾, Yesi Puspita²⁾, Alna Hanana³⁾, Rizki Putra Aslendra⁴⁾, Hafiz Sayutie Arvi⁵⁾

- 1) Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas; rinaldi@soc.unand.ac.id
- 2) Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas; yesifisip@gmail.com
- 3) Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas; alna@soc.unand.ac.id
- 4) Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas; aslendra79@gmail.com
- 5) Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas; s.ahafiz14@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu 2019 yang baru saja dilalui sangat kental dengan aroma politik identitas. Isu yang disuarakan sebagian besar berkaitan dengan kelompok, agama, ras, dan suku tertentu. Kita jarang mendengar isu yang berkembang di masyarakat tentang wacana visi/misi, program yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Wacana yang terbangun seputar pemilu, baik menjelang pemilu ataupun sampai saat ini sangat didominasi oleh wacana politik identitas. Jika kita menyimak percakapan di sosial media, warung-warung, perkumpulan dan organisasi di Sumatera Barat adalah memilih berdasarkan agama, suku, kelompok, dan lainnya. Artinya politik identitas sangat kuat dirasakan pada pemilu 2019 ini. Pilihan politik seseorang bukan didasarkan dari rekam jejak, program kerja, ataupun janji kampanye yang ditawarkan. Akan tetapi pilihan didasarkan atas identitas yang dibawa oleh individu yang menjadi calon. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan wacana politik identitas kalangan Jamaah Syatariah pada pemilu 2019. Penelitian ini juga melihat keputusan politik Jamaah Syatariah berdasarkan wacana politik identitas yang mereka dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga sumber pembentuk wacana politik identitas, yaitu tuanku, media, dan kerabat. *Syatariah*.

Kata Kunci: Jamaah Syatariah, Komunikasi Politik, Politik Identitas

ABSTRACT

*The 2019 election that was just passed was thick with the aroma of identity politics. The issues raised are mostly related to certain groups, religions, races and ethnicities. We rarely hear issues that develop in the community about discourse on vision / mission, programs offered, and so forth. The discourse that is built around the election, both ahead of the election or until now is very dominated by the discourse on identity politics. If we listen to the conversation on social media, food stalls, associations and organizations in West Sumatra is to choose based on religion, ethnicity, groups, and others. This means that identity politics is very strongly felt in this 2019 election. A person's political choices are not based on track records, work programs, or campaign promises offered. However, the choice is based on the identity carried by the individual who is a candidate. This research was conducted qualitatively with an explanatory approach. The research aims to describe the political discourse on identity among the Sharia Pilgrims in the 2019 elections. This study also looked at the political decision of the Sharia Jamaah based on the political discourse on identity that they got. The results showed that there were three sources of identity politics discourse, namely Tuanku, the media, and relatives. *Syariah*.*

Keyword: *Jamaah Syatariah, Political Communication, Identity Politics*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sudah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak empat kali sejak reformasi pada 1998 bergulir. Tahun ini, tepatnya 20 tahun pacareformasi, adalah tahun politik. Masing-masing partai politik mulai terlihat menentukan strategi politiknya. Hal ini sudah mulai terlihat sejak pelaksanaan kampanye pilkada serentak di beberapa provinsi. Politik aliran, yang cukup berhasil terlihat pada pilkada Jakarta bisa menjadi sarana untuk mendulang suara di pemilu 2019 nanti.

Jamaah Syatariah, sebagai sebuah organisasi tarekat yang cukup banyak pengikutnya selalu mendapat perhatian lebih bagi partai politik untuk mendulang suara di Sumatera Barat. Hal ini bisa terlihat dari sejarah politik para Tuanku di jamaah ini sejak zaman orde baru, awal reformasi, hingga pemilu terakhir 2014 lalu. Mereka selalu menjadi caleg dan anggota legislative partai tertentu.

Wacana yang terbangun seputar pemilu, baik menjelang pemilu ataupun sampai saat ini sangat didominasi oleh wacana politik identitas. Jika kita menyimak percakapan di sosial media, warung-warung, perkumpulan dan organisasi di Sumatera Barat adalah memilih berdasarkan agama, suku, kelompok, dan lainnya. Artinya politik identitas sangat kuat dirasakan pada pemilu 2019 ini. Pilihan politik seseorang bukan didasarkan dari rekam jejak, program kerja, ataupun janji kampanye yang ditawarkan. Akan tetapi pilihan didasarkan atas identitas yang dibawa oleh individu yang menjadi calon.

Kondisi penyebaran politik identitas melalui wacana yang dibangun di tengah masyarakat juga penulis lihat di kalangan Jamaah Syatariah. Sebagai sebuah organisasi tarekat yang punya pengikut yang cukup banyak di Sumatera Barat, Jamaah Syatariah memainkan peran politik identitas. Hal ini penulis dapatkan dari pernyataan salah satu Tuanku yang disegani dalam Jamaah Syatariah, Tuanku Sutan. Beliau mengatakan, pilihan politik Jamaah Syatariah dijatuhkan pada individu yang berasal dari jamaah tersebut, atau individu di luar jamaah tetapi dia menjalankan amalan Jamaah Syatariah.

“Kami akan memilih orang yang berasal dari Jamaah Syatariah, karena merekalah yang akan memperjuangkan kami nantinya di legislatif. Kalau tidak dari kita siapa lagi yang akan memperjuangkan kita.” ujar Tuanku Sutan saat jumpai menjelang pemilu 2019 lalu.

Praktik menjatuhkan pilihan politik berdasarkan politik identitas tentu ibarat buah simalakama. Di satu sisi, jika politik identitas menguat, orang tidak akan memilih berdasarkan visi/misi dan apa yang ditawarkan si calon anggota depan, melainkan berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan ras, primordialisme dan mengesampingkan kecakapan seseorang. Tapi di sisi lain, memilih seseorang hanya berdasarkan visi/misi dan program kerja belum menjadi budaya di Indonesia.

Tuanku, dalam Jamaah Syatariah memiliki posisi yang berpengaruh signifikan dalam menentukan wacana yang diperbincangkan jamaah untuk menetapkan keputusan politik jamaah. Besar kemungkinan, pilihan politik Tuanku menjadi pilihan politik jamaah. Setidaknya hal ini berlaku pada pemilu 1999 dan beberapa pemilu sesudahnya di kalangan Jamaah Syatariah.

Menurut Nimmo (2011: 46), sebagian besar dari politikus, komunikator profesional, dan aktivis politik adalah pemimpin organisasi. Semakin penting posisi seseorang dalam jaringan komunikasi, semakin besar kemungkinan dia memengaruhi wacana yang berkembang dalam anggotanya. Komunikator politik biasanya akan diikuti oleh anggota organisasinya.

Penelitian ini mencoba untuk menggali bagaimana pembentukan wacana di kalangan Jamaah Syatariah yang berkontribusi dalam menguatkan politik identitas. Untuk mengetahui hal itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Wacana Politik Identitas pada Pemilu 2019 di Kalangan Jamaah Syatariah.” Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Wacana Politik Identitas pada Pemilu 2019 di Kalangan Jamaah Syatariah. Dengan Tujuan penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan wacana politik identitas kalangan Jamaah Syatariah pada pemilu 2019.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan dan pemahaman di bidang komunikasi politik. Diharapkan penelitian ini juga mampu memberikan tambahan data dan masukan bagi kaum akademisi bahwa wacana yang terbangun punya peran signifikan dalam membentuk sikap politik jamaah, dan Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh sejauh mana praktik politik aliran berlangsung pada pemilu 2019.

2. METODE

Komunikasi Politik

Membahas komunikasi politik dengan pendekatan ilmu komunikasi akan lebih berfokus dalam membahas pesan politik, propaganda politik, penggunaan media, dan komunikator politik. Komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisipliner yang dibangun atas bebrbagai macam disiplin ilmu. Terutama yang berkaitan dengan proses politik dan proses komunikasi. Karenanya, bahasan terbanyak membahs tentang persuasi terhadap pemilih, debat antarkandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat dalam kampanye (McQuil dalam Cangara, 2009:12).

Kajian seputar komunikasi politik menurut Herianto dan Rumaru (2013: 1-2) setidaknya sudah memasuki tiga generasi. Pertama, dimulai dari kuatnya kajian seputar retorika sebagai aktivitas komunikasi politik. Sebagian besar kajian dalam masa

generasi ini diarahkan pada kajian seni berbicara. Dalam hal ini, debat publik adalah media yang dipakai dalam kegiatan komunikasi politik.

Generasi kedua, ditandai dengan kuatnya pengaruh media melalui iklan dan kampanye politik di media massa. Kegiatan politik tidak terlepas dari penggunaan media massa dalam menyampaikan pesan politiknya. Kegiatan propaganda, kampanye, public relation, semuanya menggunakan media massa.

Generasi ketiga dalam kajian komunikasi politik dimulai dengan maraknya penggunaan *new media* dalam kampanye. Setiap kegiatan politik sangat mengandalkan kekuatan sosial media dalam aktivitasnya. Menjelang pemilu 2019 fenomena ini dengan mudah kita lihat dengan penggunaan berbagai *hashtag* dalam kampanye.

Komunikasi politik secara sederhana dibahas oleh Nimmo melalui pendekatan konsep komunikasi yang diutarakan oleh Laswell. Konsep tersebut adalah siapa mengatakan apa? Dengan saluran apa dia mengatakan? Kepada siapa dia berbicara? Dan apa akibat pembicaraan tersebut?

Sebagian besar pendekatan yang dilakukan dalam melihat komunikasi politik adalah sebuah proses yang linear. Artinya proses komunikasi politik sangat terpolo, bisa diprediksi, dan cenderung statis. Akan tetapi Mulyana (2014 :10-12) melihat komunikasi politik dengan pendekatan alternatif. Beliau melihat komunikasi politik di Indonesia cenderung terjadi dalam konteks komunikasi tingkat tinggi, penuh simbol, dan sulit ditebak.

Menggunakan perspektif interpretif dan transaksional, Mulyana mendefinisikan komunikasi politik sebagai “pertukaran makna di antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan distribusi dan pengelolaan kekuasaan” (Mulyana, 2014:10).

Penelitian ini juga akan menitikberatkan pada komunikator politik dalam hal ini adalah Tuanku sebagai *opinion leader*. Komunikator politik akan dibahas dengan secara menyeluruh. Kemudian apa yang disampaikan oleh komunikator politik tersebut. Dan tentunya bagaimana keputusan politik anggota Jamaah Syatariah setelah mendengar pembicaraan Tuanku mereka.

Komunikator Politik dan Opinion Leader

Komunikator politik punya peran yang signifikan dalam proses komunikasi politik. Karl Poper (dalam Nimmo, 2011: 29) menyebutkan bahwa ada sebuah teori yang sering dipakai dalam opini publik yang disebut dengan “teori polopor mengenai opini publik”. Dalam teori tersebut menyebutkan, bahwa *opinion leader* sebagai komunikator politik bisa menciptakan opini publik karena mereka berhasil membuat sebuah gagasan diterima. Walaupun gagasan tersebut awalnya ditolak, akan tetapi pasti akan dipertimbangkan dan pada akhirnya diterima.

Apa yang dikatakan Popper juga pernah dialami oleh bangsa Indonesia menjelang pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2014 lalu. Saat itu Jokowi sebagai calon presiden berusaha mendekati suara umat Islam (dalam hal ini suara Nahdatul Ulama) di Jawa Timur melalui pendekatan kepada kiyai-kiyai di pesantren. Cara seperti ini cukup mendatangkan suara yang banyak. Jokowi dan tim pemenangan tidak perlu mendatangi satu per satu calon pemilihnya. Mereka hanya melakukan pendekatan kepada ulama, kiyai, dan ajengan di Jawa Timur. Ketika pendekatan kepada opinion leader tersebut berhasil dilakukan, dengan sendirinya program kampanye bisa diwakili oleh para opinion leader tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan konsep teori two step flow communication. Dalam teori tersebut, setiap pesan yang diterima oleh masyarakat tidak akan langsung ditelan mentah-mentah. Biasanya masyarakat awam akan menanyakan dulu pesan yang mereka terima kepada para opinion leader mereka. Ketika opinion leader mereka menyatakan sepakat dengan pesan tersebut, maka akan diterima oleh masyarakat, tetapi sebaliknya, bila opinion leader mengatakan tidak, pesan tersebut akan ditolak.

Komunikator politik dalam kajian komunikasi politik menurut Herianto dan Rumaru terdiri dari atas berikut ini.

1. Politisi yang terbagi atas politisi wakil dan politisi ideolog
2. Aktivis, yang terbagi menjadi aktivis juru bicara dan aktivis pemuka pendapat
3. Professional, yang terbagi atas jurnalis dan professional promoter.

Konsep khalayak dalam ilmu komunikasi bisa diartikan sebagai penerima pesan. Khalayak dalam pengertian ilmu politik dimaknai sebagai masyarakat yang akan dijadikan sasaran untuk penyampaian pesan politik. Khalayak ini nantinya akan menjadi objek penyampaian opini public. Nimmo membagi public ini ke dalam tiga bagian (Nimmo, 2010: 48). Public atentif. Yang terdiri dari seluruh warga Negara yang dibedakan atas dasar tingkatnya yang tinggi dalam keterlibatan politik, informasi, perhatian, dan berpikiran kewarganegaraan. Mereka memiliki perhatian yang besar kepada politik dan berperan aktif dalam mengelola isu Tingkatan kedua disebut Dan Nimmo sebagai public berpikiran isu. Mereka ini hanya menaruh perhatian pada isu-isu tertentu saja ketimbang pada politik pada umumnya. Mereka cenderung akan memperhatikan isu yang berkaitan dengan diri dan kelompoknya saja. Public ideologis. Mereka mereka adalah orang-orang yang punya system kepercayaan yang lebih tertutup. Nilai-nilai yang dipegang erat-erat adalah asas suka atau tidak suka. Mereka menganut kepercayaan atau nilai yang secara logis saling melekat, tidak berkontradiksi terhadap satu sama lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ekplanatif untuk mengungkapkan wacana politik identitas dalam Jamaah Syatariah . Subjek pada penelitian ini jamaah dan tuanku Jamaah Syatariah yang ditetapkan secara purposif. Mengenai banyaknya subjek yang menjadi sumber

informan utama penulis tidak dibatasi selagi bisa memberikan semua data yang dibutuhkan. Akan tetapi penulis tetap menetapkan kriteria informan antara lain sebagai berikut:

1. Pemuka agama jamaah Syatariah (tuanku) di masing-masing tempat penelitian.
2. Anggota jamaah syatariah yang pernah diterpa wacana tentang politik identitas pada pemilu 2019.

Objek penelitian ini berusaha mengkaji wacana politik identitas di kalangan Jamaah Syatariah pada pemilu 2019. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pariaman dan Kabupaten Agam. Dua kabupaten ini merupakan basis massa terbesar jamaah Syatariah. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan yang diperoleh peneliti secara purposif. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku ataupun literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data menurut Bogdan dan Taylor, adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk merumuskan tema dan menemukan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada data dan hipotesis kerja itu (Moleong, 2012: 280). Secara rinci analisis data penelitian menurut Cresswell (dalam Kuswarno, 2009:72) melalui cara peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya, kemudian mengelompokkan ke dalam unit-unit bermakna (*meaning unit*), peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks (*textural description*) tentang pengalamannya, termasuk contohnya secara seksama. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi imajinatif Setelah semua itu dilakukan, kemudian penulis menggabungkannya (*composite description*). Metode yang penulis pakai dalam menguji keabsahan data adalah dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasipun juga terdiri dari berbagai macam.

3. HASIL DAN DISKUSI

Wacana Politik Identitas Jamaah Syatariah pada Pemilu 2019

Pemilu 2019 baru saja berakhir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan anggota legislatif terpilih mulai dari pusat hingga daerah tingkat dua. Begitu juga dengan presiden, KPU sudah menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih setelah terlebih dahulu menghadapi gugatan sengketa pemilu. MPR pun sudah melantik presiden dan wakil presiden terpilih.

Aktivitas pemilu pada tahun 2019 dianggap oleh banyak orang sebagai politik yang sarat nuansa politik identitas. Wacana tentang politik identitas dimulai saat pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Saat itu, tiga pasangan cagub-jawagub yang bertarung memainkan wacana politik identitas masing-masing. Apalagi saat putaran kedua yang

hanya menyisakan Anies-sandi, dan Ahok-Djarot. Masing-masing dianggap merepresentasikan identitas yang berbeda. Ahok dianggap mewakili identitas Kristen. Sedangkan Anies dianggap mewakili kelpompok muslim.

Sejatanya politik identitas punya sejarah yang panjang dalam politik Indonesia. Selama ini beredar pameo kalau ingin menjadi presiden Indonesia haruslah berasal dari etnis Jawa. Dan itu berlaku hingga saat ini. Semua presiden Indonesia berasal dari etnis Jawa, kecuali presiden B.J. Habibie. Beliau menjadi presiden karena menggantikan presiden Soeharto yang dijatuhkan para tokoh reformasi, kemudian Habibie naik menggantikan Soeharto.

Bukan hanya di tingkat nasional, politik identitas berlaku di hampir seluruh wilayah Indonesia. Di Sumatera Utara misalnya, beberapa kali edisi pemilihan gubernur selalu menghadirkan calon dari etnis Jawa, karena etnis Jawa merupakan etnis terbesar di Sumatera Utara. Fenomena yang sama juga terjadi di Sumatera Barat. Wacana tentang politik identitas juga menjadi perbincangan pada setiap perhelatan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Tak terkecuali pada pemilu 2019 pemilu yang baru saja usai.

Penelitian ini mencoba melihat wacana tentang politik identitas di kalangan jamaah Syatariah. Berdasarkan hasil penelitian, politik identitas tidak bisa dihindarkan dari politik Indonesia. Di kalangan Jamaah Syatariah. Wacana politik identitas dibentuk oleh tiga unsur, yaitu Tuanku, Media, dan keluarga atau rekan.

Posisi Tuanku dalam Jamaah Syatariah dibagi menjadi dua posisi inti. *Pertama*, Tuanku yang berposisi untuk keperluan ibadah, jumlahnya ada beberapa orang, mereka berpusat di Kecamatan Ulakan, Pariaman. *Kedua*, Tuanku pimpinan secara kelembagaan berpusat di Koto Tuo, Kabupaten Agam.

Arahan Tuanku dalam Jamaah Syatariah punya potensi besar dalam menentukan keputusan politik jamaahnya pada pemilu 2019. Biasanya para jamaah yang sebagian besar terdiri dari orang yang sudah lanjut usia, buta akan kondisi politik yang ada. Bagi para jamaah ini, arahan Tuanku menjadi pertimbangan dalam menentukan putusan politik.

“Pasti ada yang bertanya, kemana arah tujuan pilihan pastinya, tapi saya akan arahkan mereka kepada partai yang cocok di hati mereka,” ujar Tuanku Ismail, pimpinan Jamaah Syatariah Sumatera Barat saat diwawancarai di kediamannya di Koto Tuo, Kabupaten Agam.

Jamaah Syatariah menurut Tuanku Ismail tidak pernah mewajibkan anggotanya untuk memilih partai ataupun calon tertentu. Akan tetapi para anggota jamaah juga tidak dibenarkan untuk golput. Menurutnya, Jamaah Syatariah sebagai sebuah organisasi tarekat tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Walaupun pimpinan mereka ikut

berpolitik sekalipun (sebagai informasi, pimpinan Jamaah Syatariah sudah mulai berpolitik sejak tahun 1971 melalui partai Golkar). Hal ini merupakan hasil keputusan Jamaah Syatariah yang menyatakan bahwa Jamaah Syatariah tidak dibenarkan untuk terlibat politik praktis secara kelembagaan, tetapi bila individu berpolitik tidak dilarang.

Bagi anggota Jamaah Syatariah, pilihan politik juga tidak terlepas dari politik identitas yang menjadi ciri dari publik ideologis, hampir semua informan yang penulis wawancarai menyatakan prioritas utama mereka dalam memilih calon adalah orang-orang yang mendukung amaliyah Jamaah Syatariah.

“Siapa pun boleh dipilih oleh anggota jamaah syatariah, baik dari partai yang saya ikuti ataupun partai lain. Syaratnya sederhana, selagi mereka mereka masih menjalankan amaliyah jamaah seperti khutbah solat jumat berbahasa arab dan menentukan awal puasa /lebaran dengan melihat bulan,” urai Tuanku Ismet.

Hal yang sama diungkapkan oleh pimpinan Syatariah yang lain, Tuanku Sutan saat ditemui usai mengajar di Pesantren Luhur Syekh Burhanudin, Tanjung Medan, Pariaman. Menurutnya, Tuanku berfungsi untuk memberi anjuran dan pandangan tentang kondisi politik yang ada. Sedangkan pilihan politik jamaah dikembalikan kepada individu masing-masing.

“Pilihan berpulang kepada individu masing-masing. Siapa yang dia pilih nantinya pada saat pemilu nanti. Secara garis besar kemungkinan sekitar 50% masyarakat akan mengikuti anjuran Tuanku namun tidak bisa dipastikan,” ujar Tuanku Sutan

Pernyataan Tuanku Sutan juga diamini oleh salah seorang Jamaah bernama Novrisandi.

“Menurut saya kalau faktor dari sesama Jamaah Syatariah itu ada juga. Kami memiliki pemikiran yang tenang serta dari aliran ibadah yang sama. Calon pemimpin dari jamaah syatariah pasti memiliki sama pemikiran dengan saya,” ungkap Novrisandi.

Penyampaian pandangan dan ajakan politik oleh Tuanku disampaikan melalui beberapa cara. Acara pengajian rutin merupakan sarana penyampaian ajakan dan pandangan politik yang paling sering dilakukan oleh Tuanku. Melalui pengajian, Tuanku akan mudah mendiskusikan apa yang terjadi di dunia politik.

Tuanku Sutan misalnya, setiap minggu mengadakan beberapa kali pengajian. Ada pengajian yang diberikan untuk masyarakat umum, beberapa hari setelahnya ada pengajian khusus perempuan, dan ada pengajian khusus laki-laki. Dari berbagai kesempatan pengajian itulah Tuanku menyampaikan pandangan politik dan ajakan untuk memilih individu tertentu bagi Jamaah Syatariah.

Tuanku dalam kajian komunikasi politik termasuk ke dalam *opinion leader* yang biasanya suara mereka sangat didengarkan oleh pengikutnya. Karl Poper (dalam Nimmo, 2011: 29) menyebutkan bahwa *opinion leader* sebagai komunikator politik bisa menciptakan opini publik karena mereka berhasil membuat sebuah gagasan diterima. Walaupun gagasan tersebut awalnya ditolak, akan tetapi pasti akan dipertimbangkan dan pada akhirnya diterima.

Cara selanjutnya yang dilakukan Tuanku dalam menyampaikan pandangan politiknya kepada jamaah melalui pertemuan informal. Para Jamaah seringkali menanyakan berbagai hal kepada Tuanku di luar pengajian. Pada waktu tertentu, jamaah mendatangi Tuanku untuk meminta didoakan, menceritakan pengalaman, ataupun meminta masukan terhadap masalah yang dihadapi. Pada kesempatan itulah Tuanku biasanya memberikan pandangan politiknya kepada jamaah mereka.

“Dalam momen-momen duduk besar, acara pertemuan, pengajian dan lainnya saya sampaikan (tentang pandangan politik),” terang Tuanku Ismail.

Selain melalui pengajian dan pertemuan informal, Tuanku juga menyampaikan pandangan politiknya saat bertemu dengan masyarakat di warung-warung kopi. Menurut Tuanku Sutan, kesempatan di warung dipergunakan untuk meluruskan pandangan masyarakat terhadap politik dan isu yang berkembang.

“Terkadang saya juga menyampaikannya di kedai kopi namun tidak terlalu sering, saya akan meluruskan apa yang terjadi ketika perdebatan sudah menyeleweng misalnya contoh kasus Jokowi yang tidak bisa membaca al fatihah dan Prabowo memakai salib,” ujar Tuanku Sutan

Selain Tuanku, faktor kedua yang menentukan wacana tentang politik identitas juga dipengaruhi oleh rekan ataupun keluarga para jamaah. Menurut mereka, hubungan primordial seperti itu menentukan pilihan karena mudah dilihat sepak terjang calon yang dipilih. *“....salah satu calonnya merupakan orang kampung saya karena saya melihat kinerjanya bagus saat bekerja di walinagari,”* ujar Novrisandi.

Faktor terakhir yang membentuk wacana politik identitas adalah media. Walaupun informan yang mengatakan ini tidak terlalu banyak. Media dianggap masih sangat berpengaruh dalam menentukan wacana politik. Apalagi di kalangan Jamaah Syatariah yang sebagian besar sudah lanjut usia. Bagi mereka referensi informasi salah satunya didapatkan melalui televisi dan koran.

“(media) sangat berpengaruh, tetapi kadang ada yang salah dan benar. Harusnya media melaksanakan sesuai kaidahnya yang nampak bukti dan contohnya. Saya biasanya melihat dari TV, kebanyakan nonton TV One dan RCTI,” terang Zaini menjelaskan pengaruh wacana yang dibentuk media.

Politik identitas secara sederhana didefinisikan dengan sebagai aktivitas politik yang didasarkan atas persamaan ras, agama, ataupun jenis kelamin. Singkatnya keputusan politik bukan didasari atas program kerja ataupun visi misi calon maupun partai.

Berdasarkan beberapa faktor pembentuk politik wacana identitas yang sudah disebutkan di atas. Terdapat tiga wacana yang terbentuk dari hasil di lapangan. Pertama adalah identitas agama, kemudian identitas kesukuan atau primordial, dan yang terakhir adalah identitas kelompok atau jamaah.

Wacana tentang siapa dan artai apa yang dipilih sangat salah satunya ditentukan oleh agama apa yang dianut. Kesamaan agama menjadi dasar utama dalam menentukan pilihan. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pengakuan salah seorang pengamat politik asal Sumatera Utara, Pohan. Berdasarkan riset pada pilkada sumut 2018 lalu hampir 100% umut kristiani memilih pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang merupakan representasi umat kristiani.

Hal yang sama juga berlaku di kalangan Jamaah Syatariah. Anggota jamaah juga mendasari pilihan mereka berdasarkan agama calon yang akan dipilih. Menurut Wil, salah satu anggota Jamaah Syatariah yang penulis temui mengatakan bahwa orang yang dipilih harus seagama, begitu juga alirannya harus berasal dari aliran yang sama.

“Faktor agama merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan. Ia harus orang benar-benar islam. Saat ini agama Islam banyak memiliki macam aliran ada beberapa yang meragukan alirannya. Saya memilih aliran agama yang sama dengan kita,” ujar Wil.

Wacana kedua yang terbentuk dari interaksi antara tuanku, media, dan keluarga/rekan adalah mendasari pilihan politik atas dasar kesukuan atau orang-orang dekat yang berada di jaringan mereka. Bagi mereka orang yang dekat tempat tinggalnya atau dalam istilah minang disebut *badunsanak* lebih didahulukan untuk dipilih.

“Menurut saya faktor yang lebih penting adalah lingkungan daerah tempat kita tinggal atau tinggal dalam satu lingkungan yang sama. Orang-orang tinggal di daerah yang sama namun memiliki suku yang berbeda pula,” ujar Hendri.

Wacana politik identitas yang terbentuk selanjutnya adalah pilihan harus didasarkan oleh faktor kelompok atau jamaah. Menurut Tuanku Sutan, ketika memilih orang yang berasal dari Jamaah Syatariah maka aspirasi seputar Jamaah Syatariah juga akan mudah tersampaikan.

“Kami akan memilih orang berasal dari Jamaah Syatariah, karena merekalah yang akan memperjuangkan kami nantinya di legislatif. Kalau tidak dari kita siapa lagi yang akan memperjuangkan kita,” ujar Tuanku Sutan

Pilihan presiden dan wakil presiden wacana yang berkembang sedikit berbeda. Kalangan Tuanku sebagai pemuka pendapat lebih cenderung menjatuhkan pilihan politik mereka kepada Jokowi. Bahkan, mereka berusaha meluruskan informasi yang tidak benar tentang Jokowi jika karena dianggap bisa merugikan. Akan tetapi, sebagian jamaah justru menjatuhkan pilihan presiden mereka kepada Prabowo. Hal ini tentu bertolak-belakang dengan pilihan tuanku mereka.

“Saya mendukung partai Gerindra untuk menjadi pemenang. Partai Gerindra merupakan partai yang mengusung Pak Prabowo. Selama ini Partai PDIP lah berkuasa di dalam pemerintahan. Kalau Partai PDIP menang kembali akan hancurlah negeri ini,” ujar Syamsudin, salah satu anggota jamaah Syatariah.

Pilihan politik berdasarkan identitas memang menjadi tren di Indonesia sejak dulu. Kondisi ini tentu menarik untuk diamati mengingat banyaknya pilkada ke depannya.



Gambar 1
Wacana Politik Identitas Jamaah Syatariah

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tuanku di Jamaah Syatariah punya posisi yang sangat sentral sebagai *opinion leader*. Para tuanku punya peran yang signifikan dalam membentuk wacana politik identitas. Selain Tuanku, ada media yang juga berperan dalam membentuk wacana politik identitas. Terakhir, wacana politik identitas dibentuk oleh keluarga ataupun rekan para jamaah. Wacana seputar politik identitas yang terbentuk adalah tentang wacana agama, kemudian wacana kesukuan, dan yang terakhir adalah wacana seputar golongan atau jamaah. Dengan Pendidikan politik bagi pemilih sangat penting dilakukan dan digalakkan bagi anggota jamaah. Hal ini untuk menghindari praktik politik yang didasari atas unsur identitas. Disarankan bagi peneliti yang tertarik membahas jamaah syatariah untuk melakukan

penelitian untuk melihat potensi ekonomi umat yang terdapat dalam jamaah ini. Peneliti melihat, potensi ekonomi keumatan cukup besar dalam jamaah ini.

5. REFERENSI

- Changara, Hafied. (2014). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Staregi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Heryanto, Gun Gun dan Rumaru, Shulhan. (2013). *Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexi J,. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mulyana, Deddy. (2001). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mulyana, Deddy. (2014). *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. (2010). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. (2011). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung : Remaja Rosdakarya.